

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TAHUN 2022  
DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FENTIKA ALMALIA  
NPM. 1916041056**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TAHUN 2022  
DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**

**Fentika Almalia**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TAHUN 2022 DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**

**Fentika Almalia**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dari dampak kenaikan harga BBM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi serta melakukan wawancara kepada informan yang terlibat yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pemerintah Desa dan Keluarga Penerima Manfaat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program BLT subsidi BBM Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan model implementasi dari Thomas B. Smith. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program BLT subsidi BBM Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur belum berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan empat indikator yang digunakan untuk mengukur berjalannya program BLT subsidi BBM diantaranya yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan. Adapun saran dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Purwosari diharapkan dapat mengadakan evaluasi secara rutin serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan BLT, agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

**Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, Implementasi, Kemiskinan**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE 2022 DIRECT CASH ASSISTANCE PROGRAM FOR FUEL OIL SUBSIDY IN PURWOSARI VILLAGE, BATANGHARI NUBAN DISTRICT, EAST LAMPUNG REGENCY**

**By**

**Fentika Almalia**

*Direct Cash Assistance for Fuel Subsidies is a program initiated by the Indonesian Government which aims to protect the poor from the impact of rising fuel prices. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, documentation and conducting interviews with the informants involved, namely the Social Service, Sub-district Social Welfare Workers, Village Governments and Beneficiary Families. The focus of this study is to determine how the implementation of the direct cash assistance program for fuel subsidies in Purwosari Village, Batanghari Nuban District, East Lampung Regency is using the implementation model from Thomas B. Smith. The results of this study indicate that the implementation of the direct cash assistance program for fuel subsidies in Purwosari Village, Batanghari Nuban District, East Lampung Regency has not gone well. This is based on four indicators used to measure the implementation of the direct cash assistance program for fuel subsidies, including ideal policies, target groups, implementing organizations and environmental factors. The suggestion from this study is that the Purwosari Village Government is expected to be able to conduct routine evaluations and improve the quality of human resources directly related to direct cash assistance, so that the implementation of the program can run well and on target.*

***Key Words: Direct Cash Assistance, Implementation, Poverty***

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TAHUN 2022 DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Fentika Almalia**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1916041056**  
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**  
NIP. 19630206 198803 1 002

  
**Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19880712 201903 1 012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  
**Meilhyana, S.IP., M.A.**  
NIP. 19740520 200112 2 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**

**Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si**

**Penguji : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.**

**NIP 19760821 200003 2 001**

.....

.....

.....

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Januari 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan,



Fentika Almalia  
NPM 1916041056

## RIWAYAT HIDUP



Fentika Almalia, lahir di Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 1 Juni 2001 sebagai anak tunggal dan buah kasih dari pasangan Bapak Misdiono dan Ibu Nurhayati. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Purwosari tahun 2007-2013, selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Kotagajah tahun 2013-2016, Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kotagajah tahun 2016-2019, dan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis cukup aktif dalam mengikuti organisasi tingkat Universitas, maupun Jurusan yakni UKM Bidang Seni, KOPMA UNILA dan HIMAGARA. Pada tahun 2021 penulis mengikuti Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMII)-Kampus Merdeka oleh Kemendikbud pada bulan Agustus hingga Oktober di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada tahun 2021 juga penulis mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa pada bulan Agustus hingga Desember di Universitas Sriwijaya. Pada bulan Januari hingga Februari 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Lalu, pada bulan Maret hingga Agustus 2022 penulis melaksanakan Magang Merdeka di Dinas Perkerjaan Umum Kota Bandar Lampung.



## **MOTTO**

“Langkah semut saja Allah dengar, apalagi pelannya suara doamu, Allah tidak akan menyalahi janjinya”

**(QS. Ar-Rum:6)**

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

**(QS. Ar Rum: 60)**

“Selalu libatkan Allah dalam setiap persoalan apapun, trust to Allah for everything no matter what”

**(Fentika Almalia)**

## **PERSEMBAHAN**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus, kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Ibu dan Bapak Tercinta  
Almh. Ibu Nurhayati dan Bapak Misdiono**

Serta

**Mbah Uti dan Mbah Kakung Tersayang  
Mbah Sumarti dan Mbah Markun**

Terimakasih atas segala do'a, cinta sayang, pengorbanan, perjuangan, dan dukungan yang sampai sekarang tidak terhitung jumlahnya. Terimakasih juga karena kalian masih bisa membimbing dan menemaniku sampai sejauh ini.

Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang, Amin.

Kupersembahkan kelulusan ini untuk kalian semua sebagai janji, tugas dan kewajiban seorang anak dan cucu. Aku akan terus berjuang dalam mencapai apa yang dicita-citakan dan akan terus berusaha membahagiakan kalian.

Para dosen pendidik yang telah membimbing dan mendidik dengan sabar tanpa tanda jasa.

Sahabat dan teman-teman serta

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2022 di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya dihari akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terselpas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Utoyo, M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan sekaligus dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, nasihat, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu melimpahi Pak Bambang.
2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing pembantu penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih untuk seluruh saran dan masukan yang bapak berikan kepada penulis. Terimakasih juga karena bapak selalu sabar ketika mengarahkan penulis mengenai penelitian penulis lakukan. Semoga Pak Dodi dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih untuk seluruh saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis sejak seminar proposal hingga skripsi ini selesai. Serta terimakasih untuk seluruh ilmu yang sudah diberikan kepada penulis. Semoga Pak Eko dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.

4. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Meiliyana, S. IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S. Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih untuk seluruh dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar para mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup kedepannya.
8. Mbak Wulan dan mbak Uki dan seluruh Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih untuk selalu membantu dan mengurus dalam proses skripsi dan berbagai administrasi dari mulai mahasiswa baru hingga lulus.
9. Bapak Epransyah, Bapak Rustam, Bapak Seger, Ibu Suharni dan Ibu Triana selaku informan dalam penelitian ini, terimakasih atas waktu dan dedikasinya untuk membantu dalam proses pengambilan data.
10. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Bapak Misdiono dan Ibu Nurhayati (Alm) serta mbah Sumarti (Makti) dan Mbah Markun (Kakong) yang selalu tulus mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, juga memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk pakde, bude, mas pano dan mas hafid terima kasih telah mendoakan dan memberikan dukungan untuk penulis.
12. Untuk sahabat seperjuanganku Nabila, Faradila dan Diva. Terimakasih atas segala bantuan, mulai dari awal magang, membantu penulis dalam menjalankan proses penulisan skripsi, dukungan yang terus diberikan p penulis, *effort*, doa, nasehat, loyalitas dan pelajaran yang telah diberikan.
13. Teman-teman angkatan GRANADA terutama kelas Reguler B serta teman-teman KKN Gantiwarno, terimakasih untuk setiap kenangan kebersamaan yang kita lalui selama masa perkuliahan ini. Semoga kita semua dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan dan bermanfaat bagi banyak orang, amin.

14. Terkhusus sahabatku Anissa Listya Dwi Safitri, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.
15. Alif Aditya, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
16. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025

Penulis,

Fentika Almalia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	7
2.2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	10
2.3. Proses Kebijakan Publik.....	11
2.4. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik .....	12
2.5. Tinjauan Tentang Bantuan Langsung Tunai .....	20
2.6. Kerangka Pemikiran .....	23
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	25
3.2. Fokus Penelitian .....	26
3.3. Lokasi Penelitian .....	27
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6. Teknik Analisis Data .....	31
3.7. Teknik Keabsahan Data .....	33
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
4.1.1. Gambaran Umum Desa Purwosari .....	36
4.1.2. Demografi desa Purwosari.....	38
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Purwosari .....	41

4.2.	Hasil Penelitian .....	42
4.3.	Pembahasan Penelitian .....	73
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
5.1.	Kesimpulan.....	97
5.2.	Saran.....	98
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2022 .....	2
Tabel 2. Penelitian terdahulu.....	7
Tabel 3. Daftar Informan.....	30
Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Purwosari tahun 2022.....	38
Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Purwosari tahun 2022.....	39
Tabel 6. Jumlah kesejahteraan keluarga Desa Purwosari tahun 2022 .....	40
Tabel 7. Perbandingan jumlah antara masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dengan masyarakat mampu yang mendapatkan bantuan.....	48
Tabel 8. Matriks hasil Penelitian.....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Pendekatan Implementation as A Political and Administrative Process.....	19
Gambar 2. Kerangka Pikir .....	24
Gambar 3. Komponen Analisis Data .....	32
Gambar 4. Struktur Pemerintah Desa Purwosari .....	41
Gambar 5. Masyarakat yang tidak menerima BLT subsidi BBM.....	50
Gambar 6. Masyarakat yang menerima BLT subsidi BBM.....	50
Gambar 7. Surat Pemberitahuan Kepada KPM .....	56

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang masih belum terselesaikan diberbagai negara berkembang salah satunya negara Indonesia. Dengan adanya permasalahan kemiskinan tersebut, Pemerintah Indonesia membuat program-program dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Adapun program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Indonesia menjadi salah satu negara yang sampai saat ini masih tergolong sebagai negara berkembang karena kurangnya kualitas sumber daya manusia. Kurangnya kualitas sumber daya manusia ini tentu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor termasuk kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor seperti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas lapangan kerja sedikit, distribusi pendapatan yang tidak merata, hingga masyarakat pengangguran yang meningkat (Nafi'ah, 2021).

Menurut data kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang atau sekitar 9,57%.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Penduduk miskin ini tersebar diberbagai provinsi, salah satunya di Provinsi Lampung. Berikut disajikan jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2022.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
1.	Lampung Timur	149,12
2.	Lampung Tengah	143,34
3.	Lampung Selatan	136,21
4.	Lampung Utara	114,67
5.	Bandar Lampung	90,51
6.	Tanggamus	67,43
7.	Pesawaran	63,17
8.	Way Kanan	54,28
9.	Tulang Bawang	39,19
10.	Pringsewu	38,18
11.	Lampung Barat	36,20
12.	Pesisir Barat	21,85
13.	Tulang Bawang Barat	20,72
14.	Mesuji	13,88
15.	Metro	13,68
<b>Lampung</b>		<b>1 002,41</b>

*(Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka (2023))*

Pada tabel tersebut terlihat bahwa Kabupaten Lampung Timur memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi diantara kabupaten/kota yang lain yaitu 149,12 ribu jiwa, jumlah ini tentunya merupakan angka yang cukup tinggi sehingga pemerintah harus mengeluarkan regulasi untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.

Upaya mengatasi kemiskinan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk perlindungan sosial pada masyarakat miskin. Ide mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau *Conditional Cash Transfer* (CCT) muncul di kawasan Amerika Latin tahun 1990-an, setelah itu menyebar ke negara-negara berkembang lainnya, salah satunya Negara Indonesia melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun 2005 (Larasati & Jannah, 2022). Peluncuran program BLT di Indonesia awalnya dilatarbelakangi oleh pengurangan subsidi BBM sehingga pemerintah memutuskan untuk meningkatkan harga BBM. Keputusan tersebut setidaknya disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1) meningkatnya harga minyak dunia secara melejit sehingga membebani anggaran belanja negara karena dana subsidi yang diberikan turut membesar; 2) melonjaknya minyak dunia membuat anggaran subsidi energi APBN meningkat 3 kali lipat dan akan terus meningkat dari yang sebelumnya 152,5 triliun menjadi 502,4; 3) selama ini, pemberian subsidi BBM 70 persen dinikmati kalangan menengah ke atas.

Fenomena peningkatan harga BBM di Indonesia tentu memberikan beban tambahan pada kehidupan masyarakat, terutama kalangan masyarakat miskin. Hal ini akhirnya berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena selain harus berhadapan dengan kenaikan harga BBM, masyarakat juga dihadapkan pada kenaikan harga barang dan jasa kehidupan sehari-hari. Dalam rangka membantu masyarakat meminimalisir beban tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan program BLT Subsidi BBM agar dapat meringankan beban warga terhadap kenaikan harga BBM.

Program BLT subsidi BBM merupakan pemberian sejumlah uang tunai untuk masyarakat miskin melalui alokasi selisih hasil pengurangan subsidi BBM. Program BLT subsidi BBM dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008

tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Sebelumnya terdapat penelitian dari Herdiana et al., (2021) yang membahas mengenai implementasi kebijakan BLT dana desa bagi masyarakat yang terdampak covid-19 di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan BLT alokasi dana desa yang diselenggarakan belum berjalan lancar karena masih memunculkan masalah selama proses pelaksanaannya seperti keterbatasan aparatur desa, kesalahan penentuan masyarakat sasaran serta mekanisme dalam proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winata et al., (2023) yang membahas mengenai implementasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam meringankan beban masyarakat miskin terdampak covid-19 di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan adanya masalah tidak tepat sasaran, dimana terdapat masyarakat yang menerima dua bantuan disebabkan oleh data dari DTKS yang tidak *valid* dan tidak di *update* kembali oleh pemerintah desa.

Program BLT subsidi BBM pada pelaksanaannya diharapkan dapat berdampak secara langsung dan bermanfaat bagi masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria Rumah Tangga Sasaran (RTS), meningkatkan tanggung jawab sosial bersama, serta membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk membantu kalangan masyarakat miskin supaya kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi dan mencegah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat karena kesulitan ekonomi. Namun, fakta yang terjadi dilapangan pelaksanaan program BLT subsidi BBM memberikan hambatan-hambatan yang

mengarah pada konflik sosial. Masyarakat menilai bahwa program BLT subsidi BBM ini tidak tepat sasaran hal ini dibuktikan dengan hasil survey terbaru indikator politik Indonesia pada 22 Oktober 2022 sebanyak 59,8% masyarakat menilai bahwa program BLT subsidi BBM tidak tepat sasaran (Layanan Konsumen dan Kesehatan, 2022). Permasalahan ini pun terjadi serupa di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Dari data yang telah didapat dari hasil riset yang telah dilakukan peneliti, jumlah masyarakat yang menerima BLT subsidi BBM sebanyak 362 KK dari jumlah penduduk miskin 630 KK. Dalam pelaksanaan program BLT subsidi BBM, data yang diturunkan adalah data tahun 2015, padahal pemerintah desa telah meng-*update* data pada tahun 2020, sehingga terdapat permasalahan dalam pengimplementasian program BLT subsidi BBM di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Proses penyaluran BLT subsidi BBM ini menuai beberapa kritikan dari masyarakat salah satunya terjadi ketidakmerataan sehingga muncul kecemburuan sebagian masyarakat yang tidak terkena dampak dari bantuan ini. Masyarakat merasa bahwa terjadi kecacatan dalam proses pendataan dan kriteria penerima bantuan yang salah karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pendataan calon penerima manfaat, sehingga terdapat keluarga yang tidak memperoleh bantuan padahal layak untuk memperoleh bantuan tersebut oleh karena itu program ini sering tidak tepat sasaran.

Berdasarkan dari fenomena yang telah jabarkan, penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan program BLT subsidi BBM di Desa Purwosari, dengan judul ***“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2022 di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”***.

## **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Langsung Tunai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2022 di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2022 di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengembangan bagi keilmuan admimnistrasi publik, khususnya dalam menganalisis terkait implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi para penulis dan pihak-pihak lain umumnya yang tentunya berkaitan langsung dengan keluaran kebijakan ataupun program yang bersifat implementasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengangkat tema implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Kaitannya dengan hal ini, peneliti menggunakan tiga hasil penelitian terdahulu sebagai acuan ataupun bahan perbandingan pada penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah:

**Tabel 2. Penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Herdiana et al., 2021)	Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang	Fokus penelitian ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dan Desa untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) alokasi dana desa yang diselenggarakan Kabupaten Sumedang umumnya lancar walaupun masih memunculkan masalah selama proses pelaksanaannya seperti, keterbatasan aparatur desa, kesalahan penentuan masyarakat sasaran serta mekanisme dalam proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa.



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
2.	(Winata et al., 2023)	Implementasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam meringankan beban masyarakat miskin terdampak covid-19 di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin	Penelitian ini berfokus pada implementasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam meringankan beban masyarakat miskin terdampak covid-19 di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin	Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan adanya masalah tidak tepat sasaran, dimana terdapat masyarakat yang menerima dua bantuan disebabkan oleh data dari DTKS yang tidak <i>valid</i> dan tidak di <i>update</i> kembali oleh pemerintah desa
3.	(Mostert & Vall Castello, 2019)	<i>Long Run Educational And Spillover Effects Of Unconditional Cash Transfer; Evidence From South Africa</i>	Fokus penelitian ini ialah untuk menganalisis dampak dari kebijakan pemberian uang tunai tanpa syarat pada anak-anak ditingkat sekolah dasar dan menengah.	Hasil penelitian menandakan bahwa dukungan pemberian uang tunai untuk menunjang pendidikan di Afrika Selatan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kehadiran anak-anak di sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Selain itu, ini dibuktikan juga dengan adanya data terkait peningkatan jumlah peserta didik disetiap tahunnya.
4.	(Cahyadi et al., 2020)	<i>Cumulative Impact of Conditional Cash Transfer Programs; Experimental Evidence from Indonesia</i>	Fokus penelitian ini ialah untuk menganalisis dampak kumulatif dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif keluarga harapan di Indonesia sangat berdampak bagi masyarakat miskin hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan persalinan ibu hamil yang dibantu oleh tenaga terlatih (dokter/bidan) dalam enam tahun terakhir, kemudian terjadi pengurangan stunting atau permasalahan gizi yang terjadi pada anak, dan terjadi peningkatan pada

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
				pendaftaran dan kehadiran anak di sekolah dasar dan sekolah menengah.
5.	(Hernández Monsalve et al., 2021)	<i>Social Representations of Bogota-Colombia Inhabitants Regarding a Conditional Cash Transfer Policy</i>	Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh representasi sosial penduduk Bogota, Kolombia dalam penerapan kebijakan publik yaitu bantuan tunai bersyarat “Mas Familias en Accion”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan uang tunai bersyarat hal ini memberikan manfaat yang besar bagi warga kurang mampu di Kolombia dalam menjaga kebutuhan pokoknya. Akan tetapi, dari data yang ada program ini belum optimal dalam menjangkau target yang benar karena beberapa yang mendapatkn bantuan tersebut tingkat perekonomiannya masih tergolong menengah ke atas.

(Sumber : diolah oleh peneliti, 2023)

Perbedaan penelitian terdahulu yang dicantumkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada lokasi penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian ini di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan lokasi penelitian akan mempengaruhi hasil penelitian karena kondisi geografis dan masyarakat yang berbeda disetiap daerah yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada implementasi program BLT subsidi BBM di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Kebaharuan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada model implementasi kebijakan. Pada penelitian ini,

peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Thomas B. Smith yaitu model implementasi *bottom up* yang memiliki perspektif bahwa dalam pengimplementasian kebijakan harus melibatkan pelaksana tingkat bawah yaitu kelompok sasaran atau masyarakat karena masyarakatlah yang paham akan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan. Adapun variabel dari model implementasi kebijakan dari Thomas B. Smith yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, badan pelaksana dan faktor lingkungan.

## **2.2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik**

Secara teoritis, kebijakan publik memiliki makna yang sangat banyak. Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai keputusan atau suatu tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna menanggapi suatu permasalahan dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, apabila pemerintah mengambil keputusan untuk tidak menangani isu dan permasalahan yang ada, maka tindakan tersebut masuk dalam sebuah keputusan. Wahab dalam (Ramadhani & Ramadhani, 2017) berpendapat bahwa: 1) Kebijakan publik merupakan tindakan sadar yang ditujukan untuk meraih suatu tujuan, bukan tindakan yang acak dan tanpa sengaja untuk dilakukan; 2) Pada dasarnya, kebijakan publik terbentuk dari beberapa tindakan atau keputusan yang saling berpengaruh antar satu sama lainnya dengan pola yang jelas menuju pada upaya mencapai tujuan yang jelas dan dilaksanakan oleh pemerintah atas hasil persetujuan bersama, bukan dari keputusan independen; 3) Kebijakan publik ialah tentang tindakan pemerintah yang terukur dan sadar dilakukan oleh pemerintah pada beberapa bidang; 4) Kebijakan publik dapat bernilai positif apabila sesuai dengan pedoman tindakan pemerintah yang seharusnya dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Selanjutnya pendapat menurut Woll dalam (Taufiqurokhman, 2014), kebijakan publik ialah segala aktivitas yang pelaksanaannya adalah pemerintah atau pemangku negara dengan tujuan pemecahan suatu masalah ditengah kehidupan masyarakat, baik yang dilaksanakan secara langsung ataupun dengan melalui pelaksana lain seperti lembaga-lembaga yang banyak berdiri ditengah-tengah masyarakat. Menurut Dwiyanto dalam (Muhiddin, 2017) kebijakan publik perlu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, kebijakan publik juga melibatkan proses memilih dan mengkategorikan pilihan terbaik untuk dapat memecahkan permasalahan tertentu didalam masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi yang ada, peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk tindakan yang ditentukan oleh pemangku kepentingan secara terarah pada bidang-bidangnya dengan tujuan yang jelas demi tercapainya kesejahteraan khalayak ramai.

### **2.3. Proses Kebijakan Publik**

Subarsono dalam (Taufiqurokhman, 2014) mendefinisikan proses kebijakan publik sebagai sekumpulan kegiatan intelektual yang dilaksanakan pada proses kegiatan yang sifatnya politis. Kegiatan politis ini nampak pada berbagai aktivitas antara lain menyusun agenda, merumuskan kebijakan, mengadopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta mengevaluasi kebijakan. Sedangkan kegiatan intelektual terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: merumuskan masalah dan meramalkannya, merekomendasikan kebijakan, melakukan kontrol serta menilai kebijakan.

Proses kebijakan publik ialah proses kompleks karena melibatkan banyak pengkajian variabel didalamnya. William Dunn dalam (Taufiqurokhman, 2014) mengemukakan bahwa proses kebijakan publik dilaksanakan melalui lima tahap yaitu: proses menyusun

agenda, proses memformulasi kebijakan, proses mengadopsi kebijakan, proses melaksanakan kebijakan dan yang paling akhir adalah proses evaluasi kebijakan.

- 1) Penyusunan agenda (agenda setting) merupakan suatu proses penentuan isu publik yang nantinya akan dijadikan sebagai prioritas dalam agenda publik.
- 2) Penyusunan (formulasi) kebijakan publik merupakan proses pengembangan berbagai pilihan untuk pemecahan suatu masalah dari isu kebijakan tersebut.
- 3) Adopsi kebijakan merupakan proses dalam menentukan satu dari sekian alternatif yang tersedia untuk diadopsi. Proses adopsi ini membutuhkan dukungan dari beberapa hal yaitu mayoritas legislatif dan konsensus yang ada diantara direktur lembaga hukum atau putusan pengadilan.
- 4) Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan atau penggunaan dari alternatif kebijakan tersebut.
- 5) Evaluasi kebijakan ialah proses untuk menilai kebijakan yang telah diimplementasikan mencakup substansi, implementasi dan dampak.

#### **2.4.Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik terbentuk melalui lima proses yaitu menyusun agenda, merumuskan kebijakan, adopsi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan sehingga lahir kebijakan yang baru. Implementasi kebijakan menjadi satu langkah penting pada proses kebijakan karena merupakan upaya perwujudan dari kebijakan yang sudah dirumuskan. Tahap implementasi ini akan terlihat dampak dari kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat apakah dampak yang baik mampu mengatasi permasalahan masyarakat atau sebaliknya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi

dan kelompoknya (Kasmad, 2018).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam karyanya yang berjudul *The Policy Implementation Process (1975)* implementasi kebijakan publik ialah tindakan dari keputusan yang telah ditentukan. Tindakan ini meliputi serangkaian upaya dalam menerjemahkan keputusan menjadi tindakan operasional pada jangka periode tertentu atau untuk meraih tujuan tertentu. Sedangkan menurut Parson dalam (Choiriyah, 2018) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan interaksi antara penetapan tujuan dan tindakan dari pemerintah agar dapat meraih tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi kebijakan publik yang diuraikan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik ialah serangkaian kegiatan penerapan kebijakan oleh pelaksana kebijakan sehingga kebijakan yang ditetapkan mampu mencapai tujuan dan sarannya.

Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individu maupun kelompok atau mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran. Implementasi kebijakan akan mudah dipahami jika dianalisis menggunakan model khusus. Model yang digunakan akan memberikan gambaran objek, kondisi, maupun proses sehingga memudahkan untuk menilai apakah suatu keefektifan pelaksanaan kebijakan (Kasmad, 2018).

Beberapa model implementasi kebijakan yang telah diajukan dalam teori termasuk model yang dikembangkan oleh George C. Edward III pada tahun 1980 serta Donald Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975 yang dikenal dengan model *top down*. Model

implementasi pendekatan *top down* didasarkan pada logika dari atas ke bawah. Sedangkan model yang dikembangkan oleh Thomas B. Smith adalah model *bottom up*, dimana model implementasi ini logika berpikir dari bawah ke atas.

#### **a. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III**

##### 1) Komunikasi

Komunikasi, ialah aspek penting untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebijakan perlu dikomunikasikan agar para penentu kebijakan dan pelaksanaannya dapat terus-menerus saat melaksanakan setiap kebijakan yang akan dilakukan diimplementasikan dalam masyarakat.

##### 2) Sumber daya

Sumber daya pada variabel ini terdapat beberapa indikator keberhasilan diantaranya yaitu staf yang berkompeten dan memiliki keahlian serta mampu dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi yang valid, wewenang dalam hal ini adalah legitimasi para implementor dalam melaksanakan kebijakan.

##### 3) Disposisi atau sikap

Sikap atau disposisi juga memiliki peran esensial dalam pelaksanaan kebijakan, para pelaksana kebijakan harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kepentingan politik dan masyarakat.

##### 4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi perlu mendukung dan berkoordinasi dengan baik untuk menerapkan kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam variabel ini ada dua indikator yang harus diperhatikan dalam struktur organisasi yaitu standar

operating procedures (SOP) dan Fragmentasi atau pelimpahan tanggung jawab (Edward III, 1980).

Model implementasi yang diusulkan oleh George C. Edward III sejalan dengan model implementasi yang diusulkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam karyanya yang berjudul *The Policy Implementation Process* (1975) menyatakan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu standar dan tujuan, alokasi sumber daya, profil pelaksana, perilaku, komunikasi, dan konteks lingkungan.

#### **b. Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn**

##### 1) Standar, tujuan dan sasaran

Standar, tujuan dan sasaran ialah indikator kinerja penting bagi proses implementasi kebijakan. Indikator kinerja ini mengevaluasi bagaimana langkah-langkah utama dan tujuan kebijakan telah dilaksanakan. Tujuan dan sasaran perlu diidentifikasi dalam proses implementasi, sebab pelaksanaan tidak berhasil tanpa mempertimbangkan tujuan.

##### 2) Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan sumber daya, termasuk sumber daya manusia (*human resources*) ataupun sumber daya non manusia (*non-human resources*) yaitu finansial, dan waktu.

##### 3) Karakteristik Pelaksana

Dalam hal ini karakteristik pelaksana mencakup norma, struktur birokrasi, dan pola relasional yang terdapat pada birokrasi dan berpengaruh pada implementasi kebijakan.



#### 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Dalam hal ini yang dimaksud sikap atau kecenderungan para pelaksana adalah sikap setuju atau tidak setuju akan berdampak pada kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Penerimaan dan penolakan dapat terjadi karena kebijakan yang diterapkan muncul sebagai hasil rumusan pemerintah berbeda dengan penduduk sekitar yang paham akan masalah yang dialami.

#### 5) Komunikasi

Komunikasi antara lembaga dan kegiatan para pelaksana harus terjalin dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan.

#### 6) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan berperan dalam kesuksesan kebijakan publik. Maka, dalam pelaksanaan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik sekitar untuk mendukung proses implementasi (Van Meter & Van Horn, 1975).

Model implementasi pendekatan dari George C. Edward III, Donald Van Meter, dan Carl Van Horn dikritik oleh Thomas B. Smith. Thomas B. Smith menyatakan bahwa model implementasi tersebut masih cenderung fokus pada perspektif para pembuat kebijakan. Yang dimana pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan ditingkat atas dianggap lebih berhasil dalam melaksanakan implementasinya. Namun, dalam kenyataannya pelaksana tingkat bawahlah yang berperan penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Pendekatan *bottom up ini* mengkritik model *top down* dengan menolak pandangan bahwa peran pelaksana tingkat atas proses implementasi. Model implementasi Thomas B. Smith melihat bahwa pelaksanaan kebijakan terkait dengan perubahan sosial dan politik,

dengan fokus pada peningkatan atau transformasi masyarakat sebagai sasaran.

### c. Model Implementasi Thomas B. Smith

Thomas B. Smith (1973) menyatakan bahwa ada empat variabel yang harus saling berinteraksi dalam proses implementasi kebijakan publik, serta ada hubungan saling memengaruhi. Empat komponen yang disampaikan oleh Thomas B. Smith dalam implementasi kebijakan publik yaitu:

#### 1) Kebijakan Yang Diidealkan

Komponen ini didefinisikan sebagai pola-pola interaksi ideal yang telah didefinisikan dalam kebijakan oleh para perumus kebijakan (*policy maker*) dengan tujuan untuk diimplementasikan. Kebijakan yang diidealkan bertujuan untuk memberi harapan kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien dan berfokus pada *output* dan *outcome* yang dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga kebijakan dapat mengatasi masalah dengan baik.

#### 2) Kelompok Sasaran

Komponen ini merupakan individu maupun kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan serta perlu mengadopsi setiap pola-pola interaksi kebijakan tersebut sebagaimana diharapkan oleh pengambil keputusan. Dan adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi ataupun menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan bergantung pada kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka, komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan sehingga baik buruknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas

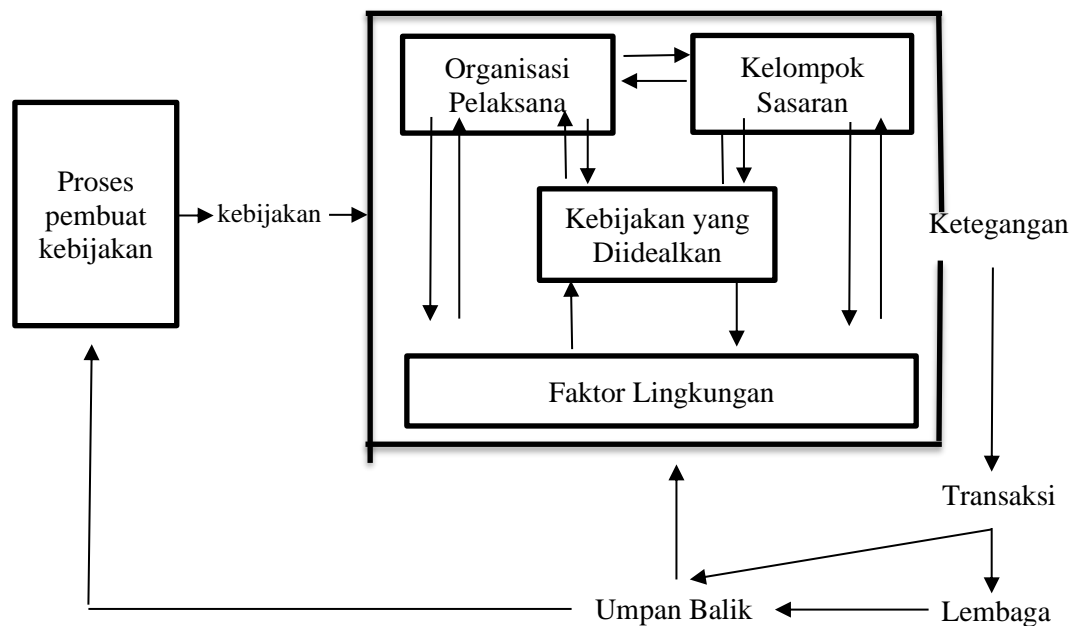
pelaksana kebijakan, serta karakteristik oleh masing-masing kelompok sasaran, seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, pengalaman, dan keadaan sosial ekonomi.

3) Badan Pelaksana

Komponen ini merupakan badan-badan pelaksana atau organisasi atau unit-unit pemerintahan yang bertugas dan bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan. Dengan melihat karakteristik lembaga-lembaga pelaksana yang dilihat dari struktur organisasi lembaga pelaksana kebijakan tersebut.

4) Faktor-Faktor Lingkungan

Komponen ini merupakan setiap bagian pada lingkungan yang memberikan pengaruh dan dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan, mulai dari aspek budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Lembaga pelaksana kebijakan harus selaras dengan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik untuk menciptakan kondisi yang stabil dalam mengimplementasikan kebijakan.



**Gambar 1. Pendekatan Implementation as A Political and Administrative Process**

Sumber : Thomas B. Smith (1973)

Berdasarkan model-model pelaksanaan kebijakan tersebut, peneliti memutuskan untuk memanfaatkan model pelaksanaan kebijakan yang dikembangkan oleh seorang pakar, yakni Thomas B. Smith (1973) Sebagai titik fokus penelitian, peneliti menerapkan model pelaksanaan kebijakan *bottom up* dari Thomas B. Smith karena model pelaksanaan kebijakan ini mengaitkan isu kebijakan dengan implementasi dan model konseptual yang menyambungkan kebijakan dengan hasil kerja (*performance*). Ini sesuai dengan topik penelitian yang akan dijelaskan oleh peneliti mengenai pelaksanaan program BLT subsidi BBM dan menghubungkannya dengan hasil kerja dari pelaksanaan kebijakan. Sebagai penyebab, peneliti memilih model implementasi *bottom up* dari Thomas B. Smith ini karena berdasarkan tipe kebijakan publik yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan atau hanya melibatkan pejabat pemerintahan pada level lokal. Masyarakat atau kelompok sasaran juga memiliki peranan penting dalam proses implementasi

kebijakan. Ini juga relevan dengan pembahasan yang akan dijelaskan oleh peneliti, mengenai pelaksanaan program BLT subsidi BBM yang akan membahas implementasi program pada level bawah.

## **2.5. Tinjauan Tentang Bantuan Langsung Tunai**

Wynandin Imawan dalam (Navillah et al., 2020) mengemukakan bahwa program bantuan langsung tunai ialah satu dari banyaknya upaya pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, dan diklasifikasikan menjadi tiga klaster. Program bantuan langsung tunai termasuk ke dalam kelompok I, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bagian dari perlindungan sosial, maka tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak lain untuk menjaga atau melindungi masyarakat miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup. Bantuan langsung tunai (*cash transfer*) adalah program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian uang tunai atau bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) atau tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*) kepada masyarakat miskin. Untuk pertama kali pemerintah meluncurkan program ini kepada masyarakat yaitu bulan Oktober 2005 dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif akibat kenaikan harga dan pengurangan subsidi BBM dan sebagai bentuk dari perlindungan sosial (*social protection*) bagi masyarakat miskin.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan pemberian sejumlah uang tunai untuk masyarakat miskin melalui alokasi selisih hasil pengurangan subsidi BBM. Program BLT subsidi BBM dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam program BLT subsidi BBM memiliki kriteria-kriteria tersendiri, yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI).
- b) Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- c) Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI.
- d) Keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
  - 1) Kriteria komponen kesehatan meliputi:
    - a. Ibu hamil/menyusui; dan
    - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
  - 2) Kriteria komponen pendidikan meliputi:
    - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
    - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
    - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
    - d. Anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
  - 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
    - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
    - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Besarnya BLT subsidi BBM yang diterima masyarakat selama empat bulan terhitung sejak bulan September 2022 hingga Desember 2022 sebesar Rp.150.000 per bulan dan pencairannya dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama cair pada bulan September senilai Rp. 300.000, sedangkan tahap kedua cair pada bulan November senilai Rp. 300.000.

Dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia”, Edi Suharto menyatakan bahwa bantuan keuangan adalah sistem jaminan sosial yang diberikan untuk kelompok rentan terhadap efek negatif jangka pendek akibat implementasi kebijakan (Tumbel et al., 2021).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini termasuk dalam kategori program jangka pendek dikarenakan bahwa program ini hanya diluncurkan pada keadaan tertentu dan sifatnya sementara, sebagaimana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan ketika terjadinya kenaikan harga BBM atau krisis ekonomi dunia yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat miskin.

Adapun pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada rumah tangga sasaran ini bertujuan untuk mengkompensasi dampak akibat pengurangan subsidi BBM dan selebihnya adalah:

- a) Untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin sehingga kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi.
- b) Untuk mencegah turunnya taraf kehidupan masyarakat miskin yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi.
- c) Untuk meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Tumbel et al.,2021).

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Kenaikan harga BBM di Indonesia pada tahun 2022 telah menambah beban masyarakat khususnya adalah masyarakat miskin. Selain harus berhadapan dengan kenaikan harga BBM, masyarakat miskin juga harus berhadapan dengan kenaikan harga barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan harian. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi turunnya daya beli masyarakat miskin.

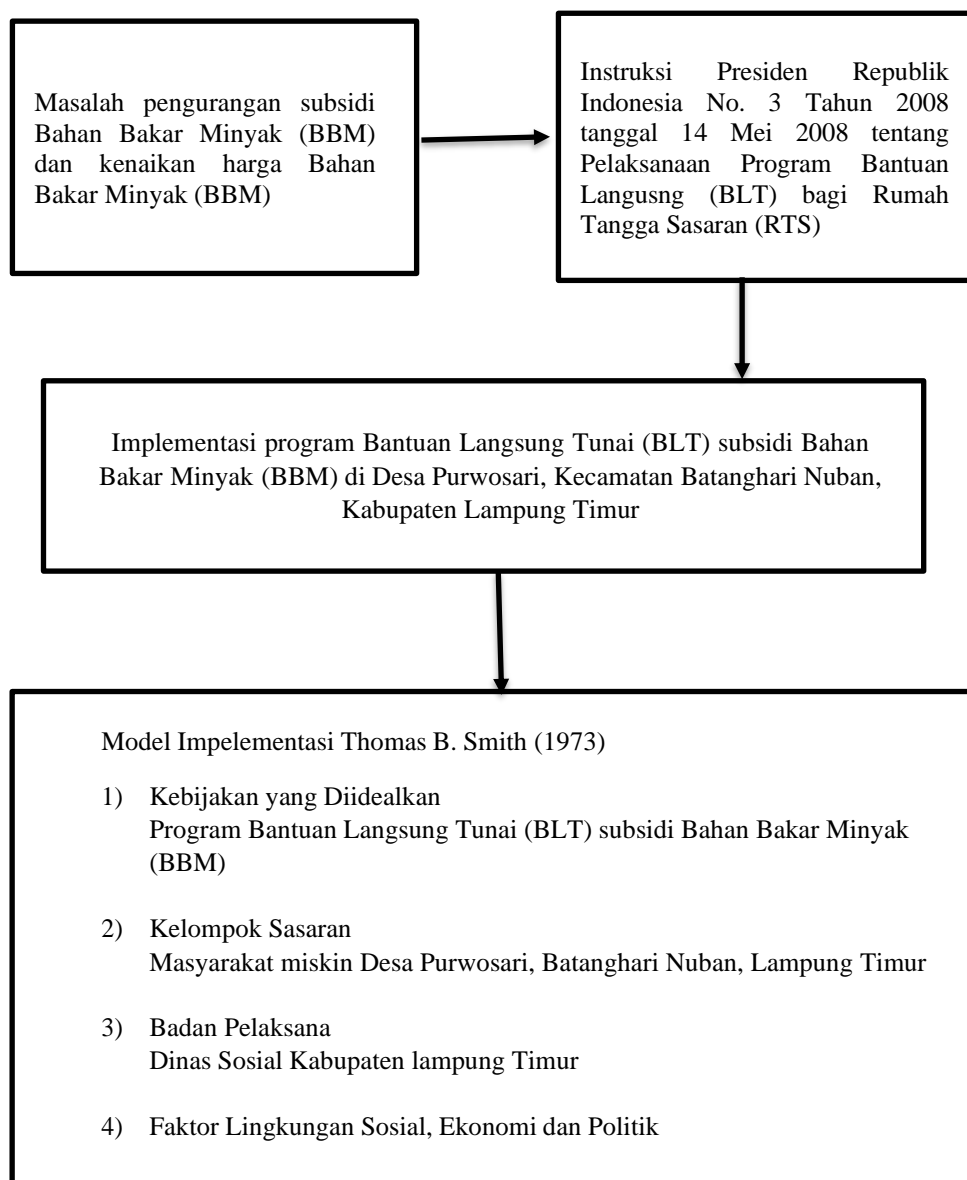
Pemerintah selaku *policy maker* membuat kebijakan untuk mengentaskan masalah tersebut dengan mengeluarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditujukan khusus untuk keluarga miskin dan berfokus pada pencegahan penurunan kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

Kebijakan dan misi terkadang tidak sesuai dengan harapan yang akan diraih. Seperti dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur permasalahan-permasalahan implementasi muncul karena kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan aparat di desa dalam menentukan kelompok sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan kecemburuan sosial antar masyarakat.

Fenomena tersebut terjadi karena terdapat permasalahan dalam proses implementasi kebijakan atau pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan pendekatan implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Thomas B. Smith untuk memperoleh gambaran bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai



(BLT)subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur melalui teori proses implementasi kebijakan yang terdiri dari kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, badan pelaksana dan faktor lingkungan. Permasalahan dan fenomena implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diuraikan terlihat dalam diagram konseptual sebagai berikut.



**Gambar 2. Kerangka Pikir**

*(Sumber : diolah oleh peneliti, 2023)*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang menemukan fakta melalui penjelasan yang benar. Dalam desain deskriptif, tujuannya hanya untuk mengidentifikasi fenomena untuk tujuan penelitian selanjutnya dengan mendeskripsikan suatu fenomena yang ada menggunakan paparan data yang telah dikumpulkan menjadi bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka (Nurdin & Hartati, 2019).

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat menguraikan fenomena lebih dalam, mengumpulkan informasi terdalam, yang dapat menunjukkan kedalaman dan detail dari data yang diteliti. Semakin dalam dan detail menggali data, maka akan semakin jelas pula kualitas penelitiannya (Nurdin & Hartati, 2019). Dalam penelitian kualitatif, pandangan partisipan dikaji melalui strategi interaktif dan juga fleksibel yang bertujuan untuk mendalami fenomena sosial yang sedang berlangsung. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan peneliti berharap dapat menghasilkan suatu penjelasan yang mendalam tentang tulisan, ucapan dan perilaku yang diamati dari masyarakat, kelompok, individu, ataupun organisasi tertentu yang dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Untuk mendapatkan hasil yang baik, peneliti harus mengumpulkan informasi dan fakta dari berbagai sumber tentang

fenomena tersebut lalu menelaah dengan teori yang ada.

### **3.2.Fokus Penelitian**

Spradley dalam (Sugiyono, 2013) mengungkapkan fokus ialah sebuah domain tunggal atau beberapa domain yang ada terkait dengan situasi sosial. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk membatasi penelitian agar tidak meluas ke ruang lingkup yang berbeda. Sehingga peneliti akan lebih fokus ke dalam pengumpulan data yang ini diteliti peneliti.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2022 di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang didasarkan pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith dengan menggunakan empat indikator yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, badan pelaksana, dan faktor lingkungan.

Adapun penjelasan terkait model implementasi kebijakan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai sebuah variabel implementasi kebijakan adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan yang diharapkan yaitu berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diimplementasikan di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.
2. Kelompok sasaran yaitu indikator sasaran kebijakan sebagai fokus penelitian untuk mengukur seberapa jauh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan target dari

program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

3. Badan pelaksana berkaitan dengan pelaksana atau penanggungjawab kebijakan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. Variabel ini digunakan untuk menilai sejauh mana dukungan dan transparansi Pemerintah Dinas Sosial dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.
4. Faktor-faktor lingkungan yaitu indikator untuk menilai seberapa besar pengaruh instansi pelaksana, dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di lokasi Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

### **3.3.Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan dan lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Lokasi penelitian ini berada di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa Lampung Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi diantara Kabupaten/Kota lain. Kemudian Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dipilih menjadi lokasi penelitian karena memiliki jumlah masyarakat miskin cukup tinggi yaitu 630 KK. Selain itu, di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuba Kabupaten Lampung Timur telah ditemukan

permasalahan ketidaktepatan kelompok sasaran dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Data tidak akan mempunyai makna bagi peneriman apabila tanpa diproses terlebih dahulu, oleh sebab itu data perlu diproses sebelum disajikan. Sumber data pada penelitian ini antara lain:

#### **1. Data Primer**

Data primer ialah informasi yang didapatkan peneliti secara langsung dari objek penelitiannya. Data primer diperoleh melalui proses wawancara peneliti dengan narasumber serta pengamatan yang perlu direvisi (Moleong, 2017). Maka, dalam mengumpulkan data primer, dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan stakeholders terkait menggunakan kuesioner yang telah disusun sebelumnya dan akan disesuaikan selama proses wawancara. Dalam studi ini, informan yang dipilih peneliti merupakan penanggung jawab program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Lampung Timur yaitu pihak Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, koordinator program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Desa Purwosari dan masyarakat penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder digunakan sebagai tambahan informasi untuk data primer. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada, diolah oleh peneliti sebagai pihak kedua.. Data sekunder juga

dikenal sebagai data yang diperoleh tidak secara langsung. Dalam studi ini, data sekunder yang akan digunakan berasal dari literatur penelitian sebelumnya, informasi dari website terkait objek penelitian, dan dokumentasi laporan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat objek penelitian, sehingga faktor-faktor pelaksanaan dapat terukur dan terpantau. Dalam hal ini, peran peneliti sebagai pengamat sangat penting ketika menggunakan teknik observasi. Peneliti melakukan observasi objektif terhadap lokasi, individu, dan aktivitas yang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti Observasi dilakukan secara langsung di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur terhadap kejadian, kegiatan, perilaku, dan hal-hal terkait dengan penelitian.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, dapat dilakukan dengan pedoman atau tanpa pedoman.

Dalam studi ini, yang menjadi narasumber adalah Kepala Seksi Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lampung

Timur, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Sekertaris Desa Purwosari di Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, serta masyarakat penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

**Tabel 3. Daftar Informan**

No	Nama Informan	Jabatan
1	Epransyah	Kepala Seksi Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
2	Rustam	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
3	Seger Ibnu Kusworo	Sekertaris Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
4	Suharni	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
5	Triana	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

*(Sumber: Diolah Peneliti, 2023)*

### 3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2013), dokumen ialah penyimpanan data penting dari peristiwa masa lalu. Studi dokumen bisa dalam bentuk tertulis, ilustrasi atau karya simbolis yang melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Pada penelitian ini, studi dokumen yang digunakan berkaitan dengan program BLT subsidi BBM di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur terdapat surat keputusan, arsip, gambar dan data- data mengenai implementasi program BLT subsidi BBM, serta informasi mengenai implementasi program BLT subsidi BBM yang telah dilaksanakan di Desa Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data melibatkan proses pencarian, pencocokan, dan pengorganisasian data ke dalam kategori yang sesuai kedalam kelompok yang lebih kecil, membuat hipotesis, menyusun pola, dan mengevaluasi kebermaknaan data untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh berbagai pihak. (Sugiyono, 2013).

Miles, Huberman dan Saldana (2014) mengenalkan dua model analisis data: model alir dan model interaktif. Dalam penelitian ini, digunakan model analisis data interaktif, dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu:

#### **1. Kondensasi Data**

Alur ini merupakan kegiatan merangkum, meringkas, memilih bagian inti dari penelitian, serta meletakkan fokus pada hal-hal yang dianggap kebermaknaan dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dan dokumen-dokumen. Hasil kondensasi data ini tercapai setelah peneliti mengumpulkan data lapangan dan wawancara, kemudian menganalisis transkrip wawancara untuk menemukan fokus penelitian yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dalam penelitian ini pada masyarakat Desa Purwosari melalui pihak-pihak terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur serta aparat Desa Purwosari mengenai pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Lokasi di Desa Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur. Dalam penelitian, kondensasi data penting untuk mengatasi jumlah data yang besar dan membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih terperinci untuk kemudian memudahkan pengumpulan data selanjutnya jika diperlukan.

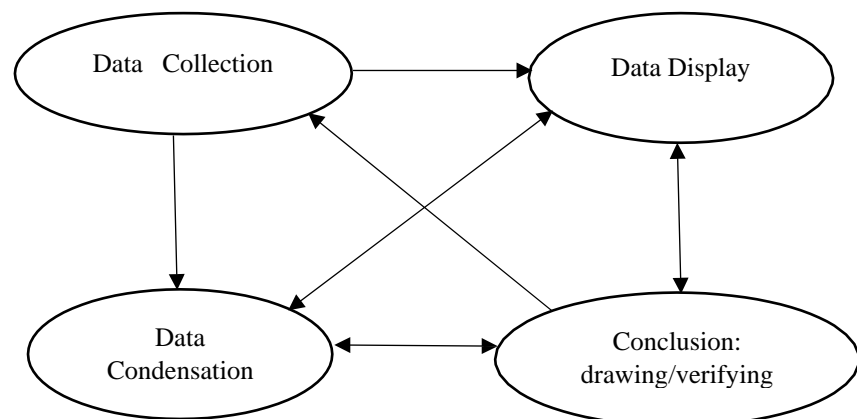


## 2. Penyajian Data

Alur ini ialah sekumpulan data yang tersusun dan memungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulannya dan menjadi dasar pengambilan tindakan. Dalam studi ini, peneliti menggunakan data disajikan secara naratif dengan rincian dalam bentuk uraian, tabel, dan foto oleh peneliti.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah tahap terakhir saat melakukan analisis data. Kesimpulan sementara diperoleh peneliti setelah dilakukan proses kondensasi data dan penyajian data. Kesimpulan ini belum memperoleh kesimpulan yang definitif tentatif karena masih dapat mengalami perubahan jika tidak ada bukti yang mendukung sifatnya kuat sebagai pendukung. Akan tetapi, jika kesimpulan yang telah dilakukan ditahap ini memperoleh bukti jika valid dan konsisten, maka dapat dikatakan kesimpulan tersebut kredibel. Dalam penelitian ini, kesimpulan disusun dengan merangkum setiap aspek penelitian dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dipaparkan.



**Gambar 3. Komponen Analisis Data**

Sumber : (Miles, Huberman dan Saldana, 2014)

### **3.7. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah prinsip penting dalam penelitian kualitatif, yang melengkapi validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, data dianggap valid jika laporan peneliti sesuai dengan kenyataan objek penelitian. Maka, data yang diperoleh harus memenuhi kriteria keabsahan (Abdussamad, 2021). (Sugiyono, 2013) mengemukakan empat teknik yang digunakan dalam keabsahan data yaitu:

#### **1. Uji Kredibilitas**

Penguatan kredibilitas dalam penelitian kualitatif melibatkan perluasan jangka waktu penelitian, peningkatan tekad penelitian, dan penggunaan triangulasi.

##### **a. Perpanjangan masa penelitian**

Perpanjangan masa penelitian ini dilakukan apabila peneliti masih belum dapat mengumpulkan data-data secara lengkap. Peneliti akan meninjau kembali informasi yang belum diperoleh sebelumnya dengan menghubungi informan dan mengumpulkan data sekunder yang diperlukan (Sugiyono, 2013).

##### **b. Meningkatkan ketekunan**

Memperhatikan dengan teliti dan terus menerus untuk meningkatkan ketelitian pengamatan. Dengan meningkatkan ketelitian, dapat diketahui keakuratan data yang terkumpul. Selain itu, peningkatan ketekunan dapat mendeskripsikan informasi dengan tepat dan terstruktur. Meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti lakukan dengan cara mencari referensi tentang implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak

(BBM).

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan pendekatan yang melibatkan penggabungan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Apabila triangulasi digunakan dalam pengumpulan data, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan yang berbeda, peneliti dapat memeriksa kredibilitas data yang terkumpul (Sugiyono, 2013). Menurut konsep triangulasi, ada tiga metode yang dapat digunakan (Sugiyono, 2013) yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik. Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai cara pengujian datanya. Triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi keakuratan data melalui berbagai metode memverifikasi data yang sudah didapatkan melalui berbagai sumber. Triangulasi sumber adalah metode untuk memverifikasi dan mencocokkan informasi yang serupa dan data yang berbeda dari informan satu ke pihak lain. Kemudian Informasi dari informan dipadukan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang memiliki kesesuaian informasi agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

## **2. Uji Transferabilitas**

Uji Transferabilitas mengonfirmasi validitas data yang diperoleh untuk memastikan hasil penelitian akurat

diimplementasikan pada situasi lain (Abdussamad, 2021). Uji transferabilitas dilakukan oleh peneliti mencoba mencari dan menghimpun informasi tentang implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Uji transferabilitas dilakukan pada tahap pembahasan, peneliti menggunakan penelitian sebelumnya untuk mendukung analisis dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

### **3. Uji Dependabilitas**

Uji Dependabilitas bertujuan untuk menegaskan relevansi hasil penelitian dengan konsistensi peneliti dalam pengumpulan data, penerapan konsep, dan formulasi kesimpulan (Abdussamad, 2021). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji dependabilitas dengan cara hasil penelitian dibahas bersama dosen pembimbing, termasuk penyediaan data mentah, laporan lapangan, pedoman wawancara, analisis data, dan catatan dari proses pengumpulan data.

### **4. Uji Konfirmabilitas**

Uji Konfirmabilitas merupakan uji terhadap hasil penelitian agar kebenarannya sesuai dan dapat dibuktikan melalui data yang ada pada laporan keuangan (Abdussamad, 2021). Pada penelitian ini uji konfirmabilitas yang dilakukan oleh peneliti dapat dilakukan melalui seminar yang bersifat terbuka atau tertutup, yang mengundang rekan-rekan, dosen pembimbing, dan dosen pembahasan untuk berdiskusi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dengan melihat indikator dari teori Thomas B. Smith maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Kebijakan yang diidealkan dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah cukup ideal karena program BLT subsidi BBM merupakan program jangka pendek yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin sebagai respon terhadap kenaikan harga BBM;
- b) Kelompok sasaran dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Purwosari dikatakan masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dan masih ada masyarakat yang tergolong mampu yang menerima bantuan;
- c) Organisasi pelaksana dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) belum berjalan dengan baik karena adanya oknum-oknum aparat desa yang tidak bertanggung jawab dalam memilih kelompok sasaran serta tidak ada keterlibatan masyarakat dalam penentuan penerima bantuan;

- d) Faktor lingkungan dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) belum terlaksana dengan baik karena masih banyak protes dari masyarakat kepada ketua RT, kepala dusun, sekertaris desa, dan kepala desa atas ketidakpuasan terhadap kelompok sasaran program.

Adapun implikasi teori dalam penelitian implementasi program yaitu penggunaan teori Thomas B. Smith yang dapat digunakan dan relevan dalam penelitian terkait implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Temuan ini mendukung pandangan Thomas B. Smith (1973) yang menekankan pentingnya keselarasan aspek kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, faktor lingkungan dalam menentukan kebijakan publik. Namun, penelitian ini menyoroti bahwa pendekatan Thomas B. Smith cenderung rentan terhadap permasalahan implementasi ditingkat lokal akibat rendahnya akuntabilitas dan kapasitas organisasi. Oleh karena itu, perlunya penyesuaian pada model implementasi dan pada keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

## **5.2.Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa masukan yang disarankan peneliti kepada pihak Pemerintah Desa Purwosari agar dapat berjalan efektif kedepannya, yaitu:

### **A. Kepada Pemerintah Desa dan Kementerian Sosial**

1. Perbaiki Pendataan dan Seleksi Sasaran: Diperlukan pendataan ulang yang transparan dan akurat untuk memastikan bahwa bantuan dialokasikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar

mempunyai. Proses pendataan harus melibatkan pihak yang independen dan dapat dipercaya, serta perlu dilakukan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Sinkronisasi Data dan Kolaborasi: Diperlukan sinkronisasi antara data lokal dan data nasional, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa dan Kementerian Sosial.
3. Penguatan Struktur Organisasi dan Peran: Perlu adanya upaya untuk menyelaraskan prosedur dan peran antara pemerintah desa dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program.
4. Sistem pengaduan desa : Pemerintah Desa Purwosari perlu menyediakan saluran pengaduan agar dapat memudahkan masyarakat melaporkan masalah. Kemudian pemerintah desa perlu membentuk tim khusus penanganan pengaduan yang bertugas memverifikasi dan mengotentikasi laporan masyarakat.
- 6) Kepada masyarakat mampu yang menjadi penerima bantuan perlu adanya kesadaran diri untuk melaporkan kepada pemerintah desa agar dapat digantikan dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
- 7) Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas ruang lingkup penelitian baik dengan menggunakan sampel tingkat kecamatan atau kabupaten atau dengan menggunakan model lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Agil Rait Ramadhan. (2017). *Implementasi Kebijakan E-Ktp Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang*. Universitas Pasundan.
- Alfathin Rangkuti, Z., & Ridwan Rangkuti, M. (2021). *Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan*. *Kalijaga Journal Of Communication*, 3(2), 141–152. <https://doi.org/10.14421/Kjc.32-04.2021>
- Amran. (2022). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Secara Merata Kepada Masyarakat*.
- Baziad, Y. N. (2016). *Penerapan Sop Penerimaan Cargo Di Pt. Garuda Indonesia* .
- Bina Taruna Gorontalo, U., Meilinda Nainggolan, E., & Mardiana, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan*. 10, 1–16.
- Biro Humas. (2021). *Kolaborasi Puskesmas - Slrt Permudah Akses Masyarakat Dapatkan Layanan*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/kolaborasi-puskesmas-slrt-permudah-akses-masyarakat-dapatkan-layanan>
- Blt Bbm Tidak Efektif Masyarakat Pilih Subsidi Atas Barang. (2022). *Asuransirama*. <https://ramains.com/artikel/blt-bbm-tidak-efektif-masyarakat-pilih-subsidi-atas-barang/>
- Budiani, N. W. (2007). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*.
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). *Cumulative Impacts Of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence From Indonesia*. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110. <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>



- Choiriyah. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
- Garini, N. A., Ramadhan, S. H., Aliyyah, I. N., Ramadhan, S., Rafinda, I., Sukmawati, E., & Sosial, P. K. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Vol. 6).
- Ginting, A. H., & Bintang, W. A. (2021). Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 24–31. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.2009>
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Sumedang: Isu Dan Tantangan. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v11i1.175>
- Hermawansyah, A., Purna, Z. A., & Sugito, A. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 5(2), 69–85. <https://doi.org/10.31605/arajang.v5i2>
- Hernández Monsalve, J. S., Jiménez-Barbosa, W. G., & Acuña Gómez, J. S. (2021). Social Representations Of Bogota - Colombia Inhabitants Regarding A Conditional Cash Transfer Policy. *Qualitative Report*, 26(3), 781–794. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4089>
- Hernawan, D., Goris Seran, G., Purnamasari, I., Purnomo, A. M., Apriliani, A., Studi, P., & Publik, A. (2022). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 1–10.
- Indah Octavia Putri. (2022). Upayakan Penyaluran Blt Bbm Tepas Sasaran, Kemensos Atur Langkah Strategis.
- Irfan Islamy, M. (N.D.). Modul Kebijakan Publik Definisi Dan Makna Kebijakan Publik.
- Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka. (2022).

- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Larasati, B., & Jannah, L. M. (2022). Transfer Kebijakan Dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/Cct) Di Indonesia. 8(1). <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i1.7257>
- Layanan Konsumen Dan Kesehatan. (2022). *Survei Indikator; Warga Nilai Penyaluran Blt Bbm Tidak Tepat Sasaran*. Databoks.
- Lee, J., & Davies, P. (2004). *Is Evidence-Based Government Possible?*
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Ekonomi Islam*, 4, 324–334.
- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Sage Publications.
- Moleong, Lexy. J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Mostert, C. M., & Vall Castello, J. (2019). Long Run Educational And Spillover Effects Of Unconditional Cash Transfers: Evidence From South Africa. *Economics And Human Biology*, 36, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2019.100817>
- Muhiddin, A. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)*.
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>
- Navillah, S., Hamdie, A. N., & Malawat, S. H. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Kantor Desa Bi-Ih Kecamatan Karang Intan Terhadap Warga Yang Terdampak Covid-19.
- Nurdin, E. S. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Maunalan Media Grafika.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Pangesti, L. A. (2018). Strategi Komunikasi Divisi Public Relations Pln Distribusi Jawa Barat Dalam Sosialisasi Subsidi Listrik Tetpat Sasaran. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 31–39. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i1.3713>
- Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret. (2022). Badan Pusat Statistik.

- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* (A. L, Ed.; 1st Ed.). Pt Grasindo.
- Rahayu, P. (2014). *Kebijakan Publik*. [Http://Pusdiklatwas.Bpkp.Go.Id](http://Pusdiklatwas.Bpkp.Go.Id)
- Ramadhani, A., & Ramadhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12.
- Rawali, S., & Nike Purnamawati, Dan. (2019). Pentingnya Komunikasi Dan Informasi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2024 (Studi Kasus Tentang Surat Keterangan Tinggal Sementara Di Kota Banjarmasin).
- Sistem Pengaduan Desa: Solusi Efektif Untuk Menangani Masalah Di Desa. (2023). Panda. [Https://Www.Panda.Id/Sistem-Pengaduan-Desa/](https://Www.Panda.Id/Sistem-Pengaduan-Desa/)
- Smith, T. B. (1973). The Policy Implementation Process. In *Policy Sciences* (Vol. 4). [Http://About.Jstor.Org/Terms](http://About.Jstor.Org/Terms)
- Subandi, R. O. P. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Covid-19 Di Desa Pelawan Kabupaten Sorolangun. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 4(1), 27–41. [Https://Www.Bps.Go.Id](https://Www.Bps.Go.Id)
- Subarsono. (2022). *Analisis Kebijakan Publik(Konsep, Teori Dan Aplikasi)*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Aipi.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik (1st Ed.)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021a). Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. 7, 79–92.
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021b). Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. 7, 79–92.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. [Https://Doi.Org/10.1177/009539977500600404](https://Doi.Org/10.1177/009539977500600404)
- Wahab Podungge, A., Bantuan Langsung Tunai, E., Bina Taruna Gorontalo, U., Madjid Podungge, A., & Indah Yuliyani Solihin, D. (2023). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. 181–195.

Winata, P., Isabella, & Amaliatulwalidain. (2023). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. In *Jisip-Unja* (Vol. 7, Issue 1).

Yendra, M., & Wetsi, W. P. M. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1, 14–22.

### **Undang-Undang**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif